

Koran Mimbar Umum

Tepercaya & Aktual

TERBIT SEJAK 6 NOVEMBER 1945

Edisi Digital tersedia di
myedisi



SENIN, 29 DESEMBER 2025

9 RAJAB 1447

Harga Eceran

Rp. 4000,- (Dalam Kota)

Luar Kota + Ongkos Kirim

Berlangganan Hub. (061) - 7330737

Terbit 8 Halaman | Tahun LXXX No.032

Warga Tanjung Rejo Tolak Pembangunan TPA

Camat Percut Tebar Ancaman

MEDAN, MIMBAR — Penolakan keras datang dari warga Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, terhadap rencana pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di wilayah mereka. Penolakan itu memuncak saat sosialisasi yang digelar pihak kecamatan beberapa hari lalu di Aula Kantor Camat Percut Sei Tuan.

Dalam forum tersebut, warga secara tegas menolak rencana Pemerintah Kabupaten Deliserdang membangun TPA di Desa Tanjung Rejo. Alasan utama penolakan adalah kekhawatiran

■ Bersambung ke Hal 7



500 Hunta untuk Korban Bencana Sumatra Siap Dipakai

Medan, MIMBAR — Menteri Investasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa 500 hunian sementara (huntau) untuk para korban bencana banjir dan longsor Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh bisa segera digunakan.



■ Bersambung ke Hal 7



Tolak UMP 2026

Buruh Siap Demo Berjilid-jilid

Jakarta, MIMBAR — Puluhan ribu buruh akan melakukan aksi demonstrasi berjilid-jilid menolak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengklaim puluhan ribu buruh akan berdemo selama dua hari berturut-turut, yakni pada 29-30 Desember 2025, di Istana Negara, Jakarta. Agenda utamanya menolak kenaikan UMP DKI Jakarta 2026 dan menolak Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) se-Jawa Barat.

Serikat buruh menolak nilai kenaikan UMP DKI Jakarta 2026 berdasarkan sejumlah alasan. Pertama, tidak masuk akal jika biaya hidup di Jakarta lebih rendah dibandingkan Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang. UMP DKI 2026 dipatok Rp5,73 juta, sementara upah minimum di Bekasi dan Karawang Rp5,95 juta.

"Mari kita lihat fakta di lapangan, apakah masuk akal jika perusahaan-perusahaan besar seperti Bank Mandiri Kantor Pusat, Bank BNI Kantor Pusat, Standard Chartered Bank, perusahaan-perusahaan asing yang berkantor di kawasan Sudirman dan Kuningan, serta perusahaan-perusahaan raksasa lainnya di Jakarta memiliki upah lebih rendah dibandingkan pabrik pancing di Karawang?" ujar Said Iqbal dalam keterangan resmi, Minggu (28/12).

Menurutnya, tidak mungkin daya beli di Jakarta lebih kecil dibandingkan daya beli di Bekasi dan Karawang. Namun, kebijakan upah di Jakarta justru menekan daya beli buruh.

Kedua, penetapan UMP DKI 2026 Rp5,73 juta lebih rendah dibandingkan hasil Survei Kebutuhan

■ Bersambung ke Hal 7



Hidayah

MUI Harus Jadi Kompas Akhlak

Oleh Dr. A. Rasyid, MA

Terpilihnya kembali Maratua Simanjuntak sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara untuk periode kedua seharusnya tidak hanya dibaca sebagai kemenangan prosedural dalam forum Musyawarah Daerah.

Lebih dari itu, keputusan ini justru membuka ruang evaluasi yang lebih serius: apakah kepemimpinan Maratua selama lima tahun terakhir benar-benar menjawab kebutuhan umat, atau sekadar bertahan karena kompromi elite keulamaan?

Kepercayaan struktural tidak

■ Bersambung ke Hal 7

Banjir Kepung Banjar Kalsel

18 Ribu Warga Terdampak, 302 Mengungsi

Kalsel, MIMBAR — Sebanyak 6.593 kepala keluarga (KK) meliputi 18.348 jiwa warga terdampak banjir di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel). Imbas banjir, sebanyak 302 warga mengungsi pada Minggu (28/12).

"Hingga pukul 09.50 Wita, petugas menghimpun data belasan ribu warga yang terdampak banjir pada 89 desa yang tersebar di 14 kecamatan," kata Plt Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar Yayan Daryanto dikonfirmasi di Banjar, Minggu.

■ Bersambung ke Hal 7



Dugaan Korupsi Nikel Rp2,7 T di Konawe Utara

Kejagung Diminta Usut Tuntas

Jakarta, MIMBAR — Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) menyurati Kejaksaan Agung untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi dan suap izin pertambangan nikel Rp2,7 triliun yang diduga menjerat mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman.

■ Bersambung ke Hal 7

Tradisi Berbencana?

Oleh: Rizanul Arifin

JIKA ada satu hal yang lebih konsisten daripada jadwal mudik lebaran di Sumatera, itu adalah siklus bencana hidrometeorologi. Kita tidak lagi membutuhkan kalender Masehi atau Hijriyah.

Cukuplah kita mengacu pada "Kalender Bencana Nasional" yang terbagi menjadi dua musim sakral, Musim Peringatan Dini dan Musim Tanggap Darurat. Di Sumatera, ritual tahunan ini telah menjadi semacam upacara budaya yang lebih terstruktur daripada upacara bendera hari Senin.

Sebagai upacara yang baik, semuanya telah memiliki skenario tetap, aktor-aktornya, serta dialog yang bisa ditebak ujungnya.

Semua ritual dimulai dengan sebuah kitab suci yang disebut Kajian Risiko Bencana (KRB). Kitab ini ditulis oleh para "imam" di kementerian dan dinas dengan susah payah. Isinya adalah wahyu, wilayah X rawan longsor, daerah Y akan kebanjiran 5 tahun ke depan.

Proses penulisannya sakral, melibatkan banyak rapat,



Gempa Guncang Sumbar

Warga Panik Keluar Rumah

Agam, MIMBAR — Sejumlah warga Lubuk Basung, Kabupaten Agam berhambar lari keluar rumah saat gempa magnitudo 4,6 mengguncang daerah Sumatera Barat (Sumbar) itu Minggu (28/12).

"Kami sekeluarga panik keluar rumah saat gempa terjadi, ternyata tetangga juga pada berhambar keluar rumah," kata

■ Bersambung ke Hal 7



■ Semoga segera berakhir ...

■ AMIN